

THE ANALYSIS OF INDONESIA-CHINA ECONOMIC DIPLOMACY THROUGH PALM OIL EXPORT-IMPORT MECHANISM IN 2015-2019

ANALISIS DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA-TIONGKOK MELALUI MEKANISME EKSPOR-IMPOR KELAPA SAWIT TAHUN 2015-2019

Andi Ansharullah^{1*}, Ferlin Resnu Destandi¹, Salsa Nabila Rifky¹

¹Prodi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia
Surel: andiansharullah31@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze Indonesia's economic cooperation with Tiongkok through the palm oil export-import mechanism from 2015-2019. Indonesia is known as the country with the largest palm oil commodity supplier globally. At least 39,17 million tons of palm oil produced by Indonesia throughout 2019. Meanwhile, Tiongkok was Indonesia's largest export market, with 6 million tons in 2019. Tiongkok's needs for this commodity are huge because the largest population in the world comes from Tiongkok. In this case, the author uses a dual economic theory based on the assumption of liberal figures about market competition, natural resource use, and price mechanism as instruments in increasing cooperation and meeting national interest. The research method used a descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the author used literature study in journals, books, and trusted official websites that can be justified. The finding of this study indicates that palm oil export and import that are carried out can actually increase the country's percapita income and the most significant foreign exchange contributor to Indonesia, despite frequent price fluctuations in several periods. From export-import activities carried out by the two countries, this has further strengthened the relationship to continue working together, especially in the palm oil commodities.

Keywords: Dual Economy; Economic Diplomacy; Palm Oil Export-Import.

Abstrak

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok melalui mekanisme ekspor-impor kelapa sawit dari tahun 2015-2019. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan pemasok komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Setidaknya terdapat 39,17 juta ton minyak kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia sepanjang tahun 2019. Sementara Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia dengan total 6 juta ton pada tahun 2019. Kebutuhan Tiongkok akan komoditi ini memanglah sangat besar karena jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Penulis menggunakan teori dual ekonomi yang didasari dengan adanya anggapan tokoh liberalis tentang kompetisi pasar, pemanfaatan sumber daya alam, dan mekanisme harga sebagai instrumen dalam meningkatkan kerja sama dan pemenuhan kebutuhan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi pustaka berupa jurnal, literatur, buku, dan website resmi terpercaya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor-impor kelapa sawit yang dijalankan ternyata dapat meningkatkan pendapatan perkapita negara sekaligus penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, meskipun sering terjadinya fluktuasi harga di beberapa periode. Berkat adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan kedua negara, hal tersebut semakin mempererat hubungan untuk terus bekerja sama, khususnya pada komoditi kelapa sawit.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi; Dual Ekonomi; Ekspor-Impor Kelapa Sawit.

Diajukan: 10 Oktober 2020

Direvisi: 20 Desember 2020

Diterima: 30 Desember 2020

Sitasi: Ansharullah, A., Destandi, F. R., dan Rifky, S. N. (2020). Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia-Tiongkok Melalui Mekanisme Ekspor-Impor Kelapa Sawit Tahun 2015-2019. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25 (2), 115-130.

Pendahuluan

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu jenis diplomasi yang Indonesia jalankan untuk mencapai kepentingan nasional dan meningkatkan pendapatan nasional negara. Sejatinya, diplomasi ekonomi Indonesia memiliki 4 pilar utama sebagai pondasi dalam menjalankan diplomasi tersebut. Pilar tersebut antara lain adanya peningkatan dan perluasan akses pasar produk Indonesia demi mendorong semangat para diplomat Indonesia agar lebih aktif melakukan kerja sama ekonomi. Kemudian, pilar selanjutnya berfokus pada penguatan kapasitas dan sumber daya diplomat sebagai perwakilan Indonesia dipasar non tradisional. Tidak hanya itu, mendorong investasi asing pada sektor unggulan Indonesia dan investasi Indonesia di luar negeri juga menjadi salah satu pilar tersebut. Terakhir, pilar tersebut berfokus dalam memaksimalkan forum AEC (Asean Economic Community). Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan non-migas di Indonesia berpeluang besar sebagai alat diplomasi ekonomi dalam meningkatkan pendapatan nasional negara. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya ekspor minyak kelapa sawit yang telah berkembang pesat. Maka, ekspor-impor kelapa sawit menjadi salah satu pilihan dalam kegiatan diplomasi ekonomi.

Sejatinya, kegiatan ekspor merupakan pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri (Tanjung Marolop, 2011:63). Kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan Indonesia di ekspor ke berbagai negara lantaran dapat meningkatkan pendapatan nasional. Tiongkok sebagai salah satu negara yang terklasifikasi negara strategis menjadi sasaran pangsa pasar ekspor Indonesia dalam memaksimalkan keunggulan komoditas kelapa sawit yang ada serta meningkatkan daya saing kelapa sawit tersebut.

Sebagai negara yang memiliki tingkat produksi kelapa sawit di dunia, Indonesia turut aktif dalam mengeksport komoditinya ke Tiongkok. Tahun 2015-2019 menjadi tahun yang cukup penting dan menegangkan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Pasalnya pada periode tersebut, industri kelapa sawit di Indonesia yang dieskpor ke Tiongkok mengalami turun naik, baik dari harga nilai, volume total produksi, hingga pendapatan devisa negara. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan pendapatan devisa negara sebanyak USD 500 juta dan mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar USD 4,8 Miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya tekanan global tersebut membuat ketidakpastian perdagangan yang membuat dampak cukup signifikan pada periode tahun 2015-2016. Volume pada tahun 2015 mencapai 4.105,2 ton dan pada tahun 2016 mencapai 3.111,8 ton yang berarti mengalami penurunan. Sementara itu, sepanjang 2017, Indonesia telah memproduksi kelapa sawit Indonesia sebanyak 42,04 juta ton yang mana 31,05 juta ton telah berhasil

terserap di pangsa pasar ekspor. Kemudian, pada tahun 2018 produksi atau volume kelapa sawit mencapai 4166,5 ton. Meskipun begitu, perbedaan terjadi pada nilai FOB dari periode tersebut. Nilai FOB pada tahun 2017 menyentuh angka 2551,8 juta USD namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 2637,6 juta USD. Beda halnya ditahun 2019 dimana volume produksi kelapa sawit mencapai 36,7 juta ton sepanjang tahun 2019.

Namun, komoditas kelapa sawit Indonesia yang diekspor ke Tiongkok masih terbatas pada minyak sawit mentah/CPO (*Crued Palm Oil*) karena ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengolah kelapa sawit menjadi produk yang lebih bernilai tinggi dan ekonomis. Hal tersebut menyebabkan Indonesia hanya berkompeten dalam satu hal saja yaitu mengespor bahan tanpa diolah. Meskipun menjadi salah satu pemasok CPO terbesar di dunia dengan berkisar 32,64%, Indonesia harusnya dapat mengontrol pergerakan CPO dengan kemampuan yang dimiliki baik dalam pengontrolan jumlah maupun harga. Namun, pada faktanya Indonesia masih belum mampu mengatasi fluktuasi harga CPO dari waktu ke waktu termasuk harga CPO yang diekspor ke Tiongkok. Kondisi ini menjadi sebuah permasalahan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan Indonesia dalam mengolah CPO atau kelapa sawit mentah yang masih perlu untuk diperhatikan demi memaksimalkan produktivitas kelapa sawit Indonesia dengan kebutuhan ekspor-impor yang harus dijalankan untuk kepentingan perekonomian dan pendapatan devisa negara.

Oleh karena itu, penulis memilih Teori Dual Ekonomi dalam menganalisa fenomena yang terjadi. Teori Dual Ekonomi adalah teori yang mengadaptasi pemikiran dari aliran Liberalisme. Para pemikir teori ini meyakini bahwa salah satu unsur yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah struktur ekonominya. Struktur ekonomi ini berkaitan dengan segala aktivitas ekonomi seperti ekspor-impor dan perdagangan. Ruang lingkup perekonomian tersebut adalah pasar. Maka dari itu, perlu untuk diketahui terlebih dahulu apa saja faktor yang mempengaruhi ruang lingkup pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar yaitu kekuatan dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini penting untuk diketahui agar kita dapat menyusun kebijakan yang tepat. Kemudian dalam Teori Dual Ekonomi ini akan berfokus kepada penyusunan kebijakan – kebijakan yang akan diambil dalam upaya memajukan ekonomi. Kebijakan yang disusun antara lain melakukan kompetisi pasar, pengaturan harga, efektivitas produksi, efisiensi sumber daya, pemanfaatan modal, penemuan teknologi dan ketergantungan dari masyarakat Internasional. Dalam kerjasama ekspor-impor kelapa sawit antara Indonesia-Tiongkok, terdapat perjanjian yang menandai kerja sama ekonomi kedua negara tersebut. Perjanjian Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dimaksud adalah ACFTA. ACFTA (*ASEAN-Tiongkok Free Trade Area*) adalah organisasi hasil kesepakatan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang mana didalamnya terdapat hubungan Tiongkok dengan negara ASEAN, termasuk negara Indonesia. Untuk itu, segala kegiatan ekspor-impor yang dilakukan Indonesia-Tiongkok juga harus berdasar pada perjanjian tersebut.

Kehadiran ACFTA adalah bentuk pewujudan dari teori Dual Ekonomi yakni munculnya organisasi yang akan bermanfaat untuk memajukan perekonomian. Tiongkok dan ASEAN (termasuk Indonesia) telah menyepakati kebijakan dalam bidang ekonomi

yang ditulis di *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*. ACFTA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggota. Tujuan berikutnya adalah menciptakan suatu sistem yang transparan, mempermudah investasi, mengembangkan kebijakan yang tepat dalam kerjasama ekonomi antara negara anggota. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam KEPPRES Nomor 48 Tahun 2004 dan diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Indonesia sebagai anggota merasakan sisi positif dan sisi negatif dari adanya perjanjian ACFTA. Sisi positif dari adanya ACFTA yaitu membuka peluang untuk menarik investasi kembali. Hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA. Kemudian ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan. Sementara itu, sisi negatifnya yaitu menurunnya jumlah industri dalam negeri. Kehadiran produk impor dari Tiongkok telah menimbulkan dampak negatif terhadap lima sektor industri yaitu logam, permesinan, tekstil, elektronika, dan furniture. Hal ini berakibat pada sejumlah pelaku usaha di lima industri yang terpaksa melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.

Produk asing yang diserbu dari berbagai negara terutama dari Tiongkok dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi. Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpengas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja akan berkurang. Diantara Indonesia-Tiongkok terdapat sistem perdagangan yang dinamai sistem Bebas Hambatan. Sistem perdagangan tersebut membuat terhapusnya tarif dan bea masuk dalam kegiatan ekspor-impor Indonesia-Tiongkok. Maka dari itu, dalam kegiatan ekspor-impor CPO akan memudahkan kegiatan ekspor-impornya dan dapat menekan harga. Namun, ada kelemahan dari penghapusan tersebut, yaitutidak adanya batas kegiatan ekspor-impor karena barang-barang ekspor-impor khususnya CPO akan berdampak pada naiknya tingkat produksi. Dan dapat terjadi pengeksploitasian sumber daya secara berlebihan

Diplomasi ekonomi Indonesia yang terdiri atas 4 pilar utama memiliki 3 fokus utama, yaitu Trade, Tourism, and Investment (TTI) yang mana fokus tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. TTI pada dasarnya merupakan bidang yang terangkum dalam Rancangan Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Secara umum, kerja sama ekonomi Indonesia meliputi kegiatan perdagangan yang mana salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menjadi bahan ekspor Indonesia ke berbagai negara, khususnya Tiongkok.

Namun, dengan adanya tekanan global dan persaingan antar negara mengharuskan setiap negara melakukan hubungan atau kerjasama diantara pihak yang satu dengan yang lain agar tercapai tujuan dari nasionalnya. Diplomasi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perwakilan negara yang disebut diplomat untuk melakukan perundingan

dalam mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama melalui negosiasi. Diplomasi dapat kita artikan sebagai suatu implementasi kepandaian dan strategi pada aktivitas kerja sama antar negara yang berdaulat. Hal ini selaras dengan pendapat Sir Ernest Satow didalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice*. Salah satu jenis diplomasi yang ada di dunia adalah diplomasi ekonomi. Pembagian diplomasi ekonomi pada hakikatnya terbagi kedalam empat jenis antara lain tradisional, *niche-focused*, *evolving* dan *innovative*. Tahun 2011 menjadi tahun yang penting bagi diplomasi Indonesia karena terdapat pergeseran diplomasi dari tradisional yang didominasi isu politik menjadi diplomasi ekonomi. Hal ini dinyatakan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2012. Berdiplomasi dalam sektor ekonomi sejatinya merupakan tugas dari diplomat atau perwakilan Indonesia di luar negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri RI. Dalam hal ini, diplomat bertugas untuk aktif mendorong investasi asing dalam kepentingan ekonomi Indonesia yang sesuai dengan program cetak biru.

Percepatan dan Efektivitas Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari aktivitas perdagangan yang fokusnya adalah ekspor-impor. Dasar dari ekspor-impor dalam diplomasi ekonomi tidak bisa dilupakan dari UU Perdagangan tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di bidang ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabeanan Indonesia. Impor juga memiliki dasar hukum mengenai tata laksana impor itu sendiri dalam aktivitas perdagangan. Peraturan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Keputusan Menteri Keuangan No.453/KMK.02/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sudah mengkaji mengenai permasalahan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian pertama berjudul “Peluang Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia: Perspektif Jangka Panjang 2025” yang ditulis oleh Wayan R. Susila. Di dalam penelitiannya, Wayan R. Susila (2005) membahas mengenai analisis prospek serta peluang investasi bisnis kelapa sawit di Indonesia dengan horison waktu 2005-2025. Pada hasilnya dijelaskan bahwa permintaan konsumen yang terus meningkat, terutama pada negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok. Membuat salah satunya menjadi peluang Indonesia dalam mengembangkan lebih lanjut terkait industri kelapa sawit sebagai potensi yang dapat dimaksimalkan.

Penelitian kedua yang berjudul “*Contribution of Oil Palm Industry to Economic Growth and Poverty Alleviation in Indonesia*” yang ditulis kembali oleh Wayan R. Susila (2004). Pada penelitian ini berisikan berbagai permasalahan terkait kebijakan regional, mekanisme pasar serta bagaimana kontribusi Indonesia dalam industry perkembangan kelapa sawit Indonesia.

Kemudian, tulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait diplomasi ekonomi Indonesia melalui mekanisme ekspor-impor kelapa sawit yang diterapkan oleh Indonesia-Tiongkok, perkembangan ekspor-impor kelapa sawit yang ditinjau dari tahun 2015-2019. Kajian artikel kali ini hanya terbatas pada pembahasan latar belakang diplomasi ekonomi melalui mekanisme kelapa sawit Indonesia-Tiongkok dari tahun 2015-2019 beserta perkembangannya. Keterbatasan pembahasan tersebut dikarenakan permasalahan yang diangkat hanya mengacu kepada pembahasan diplomasi ekonomi

Indonesia-Tiongkok yang kemudian berfokus pada mekanisme kelapa sawit Indonesia-Tiongkok dari tahun 2015-2019 beserta perkembangannya.

Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pendekatan dengan mengumpulkan data yang bukan berbentuk angka. Dalam hal mencari sumber data, penulis mencari data primer dan sekunder yang didapat melalui sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, artikel jurnal, website pemerintah maupun lembaga resmi, dan website terpercaya lainnya yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus penelitian pada kajian artikel ini tertuju pada hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok terhadap mekanisme ekspor-impor kelapa sawit. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan yang menggunakan literatur melalui analisis data-data primer dan sekunder yang mana data tersebut berasal dari buku, jurnal ilmiah, website terpercaya, dan artikel resmi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Nasution memandang analisis data sebagai proses penganalisisan yang dilakukan agar dapat diinterpretasikan dengan cara disusun ke dalam suatu tema, pola, maupun kategori (Nasution, 2012: 126). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, artikel ini berusaha menjelaskan analisis terhadap suatu kebijakan melalui mekanisme ekspor-impor kelapa sawit maupun minyak mentah yang dijalankan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam mengungkapkan mekanisme yang diperlukan dengan analisis dan pembahasan yang terstruktur dan sistematis serta menggunakan teori dual ekonomi dalam perspektif liberalisme.

Hasil dan Diskusi

Sejarah dan Latar Belakang Diplomasi Ekonomi Indonesia-Tiongkok

Hubungan diplomasi yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang menjadi awal mula dari hubungan tersebut. Indonesia dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno pada tahun 1950 menjadi awal dari hubungan kedua negara. Pembukaan kerja sama kedua negara ini diawali pada November 1953 dalam sektor perdagangan. Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang mempertemukan negara Tiongkok yang diwakili oleh Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Indonesia bersama-sama hadir dan mengemukakan “lima prinsip hidup berdampingan secara damai”. Tidak hanya itu, kedua negara tersebut juga menandatangani perjanjian dwi kenegaraan yang menjadi hubungan baru Indonesia dengan Tiongkok kala itu. Namun sayangnya, hubungan kedua negara tersebut sempat renggang pada tahun 1965 lantaran kasus G30S/PKI yang menjadi faktor terbesar penyebabnya. Meskipun sempat renggang, pada tahun 1989 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok mulai dibangun kembali hingga pada tanggal 3 juli 1990 keluarlah sebuah perjanjian melalui penandatanganan *The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries* di Beijing, Tiongkok.

Pada sektor ekonomi, khususnya ekspor-impor kelapa sawit, kerja sama kedua negara dimulai sejak terbentuknya kesepakatan organisasi ASEAN Tiongkok *Free Trade*

Area (ACFTA) yang merupakan organisasi hasil kesepakatan bersama negara-negara di Asia Tenggara dan Tiongkok. Terbentuknya organisasi ini tentu memiliki berbagai tujuan. Tujuan dari adanya pembentukan organisasi ACFTA adalah untuk meningkatkan dan memperkuat diplomasi ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggota. Tidak hanya itu, organisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang terbuka dan transparan dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa melalui liberalisasi secara progresif. Mengembangkan kebijaksanaan dan menggali bidang-bidang kerja sama juga menjadi salah satu dari tujuan ini.

Pada hakikatnya, Indonesia dan Tiongkok menjalin kerja sama ekonomi, khususnya pada ekspor-impor kelapa sawit dilatarbelakangi adanya kebutuhan konsumsi Tiongkok yang begitu tinggi terhadap kelapa sawit. Tidak hanya itu, kelapa sawit dipercaya dapat menjadi alternatif bahan baku dalam menjalankan program mandatory biodiesel 5%. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selain murah, komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Terlebih lagi ketika Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berada pada perang dagang. Kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat dibatasi pemasukkannya oleh Tiongkok, sehingga alternatif lainnya adalah CPO di Indonesia.

Analisis Dual Ekonomi atas Ekspor-Import Kelapa Sawit Indonesia-Tiongkok

Teori dual ekonomi berkaitan erat dengan ekspor-impor kelapa sawit. Hal itu dikarenakan bahwa kondisi ekonomi global yang tengah mengalami dinamika persaingan mengharuskan setiap negara untuk berkompetisi dalam memaksimalkan komoditas unggulan yang dimiliki oleh negara masing-masing. Maka, hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi salah satu bukti pengimplementasian dari Teori Dual Ekonomi tersebut, yang mana memandang bahwa dunia saat ini memang sedang terjadi kompetisi antar negara. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki komoditas kelapa sawit terbesar di dunia berusaha untuk memaksimalkan potensinya secara efisiensi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun Internasional, seperti kegiatan ekspor-impor ke Tiongkok. Untuk itu, teori ini mengindikasikan bahwa kompetisi pasar yang terjadi tidak terlepas dari pengaturan harga yang ditetapkan oleh setiap negara dalam kegiatan ekspor-impor sebagai sebuah variabel dalam kompetisi pasar itu sendiri. Terlebih lagi, perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat membuat kondisi ekonomi dunia terguncang. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor dari pengaturan harga ekspor-impor yang ditetapkan. Oleh sebab itu, fenomena yang terjadi tersebut erat kaitannya dengan teori dual ekonomi.

Di sisi lain, Indonesia nyatanya dipermudah dalam hal mekanisme ekspor-impor dengan Tiongkok karena adanya perjanjian ACFTA antar negara Asia Tenggara dan negara Tiongkok. Contohnya dalam perjanjian tertulis bahwa bea masuk yang semulanya ditetapkan 90 %, menjadi 0 % untuk negara anggota ACFTA itu sendiri. Meskipun begitu, prosedur ekspor barang atau mekanisme yang ada telah memiliki tahapannya tersendiri. Tahapan yang pertama yaitu mengetahui apa yang diperbolehkan ataupun dilarang sebagai dasar kebijakan ekspor-impor. Dengan mengetahui barang apa saja yang yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sebelum melakukan ekspor-impor, maka dapat

meminimalisir terjadinya praktik kejahatan seperti ekspor-impur barang illegal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kedua, Indonesia harus memastikan barang apa yang ingin diekspor ke negara tujuan (khususnya Tiongkok). Tahapan ini tentu begitu penting karena setiap barang yang diekspor haruslah barang yang benar-benar dibutuhkan oleh negara importer sehingga setiap barang yang Indonesia miliki dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan negara tujuan itu sendiri. Tahapan selanjutnya adalah menentukan sistem pembayaran terhadap barang yang ingin dibeli (produk ekspor CPO). Tahap keempat yaitu melakukan kerja sama antara pemerintah dan daerah terkait urusan Kepabeanaan. Tahap ini bertujuan agar prosesur kepabeanaan dapat dilakukan sesuai kesepakatan yang ada. Kemudian, hal tersebut akan dilampirkan ke dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang dan dokumen lainnya. Tahap kelima adalah pengeluaran dokumen Nota Persetujuan Ekspor agar barang tersebut legal secara hukum sehingga tidak ada lagi *miss* komunikasi antar kedua belah pihak. Setelah tahap tersebut, tahap berikutnya akan dilakukan stuffing atau memasukan barang kedalam kargo. Dan yang terakhir adalah tahap menerbitkan Term CIF dan melakukan pembayaran di bank.

Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2004, ASEAN dan Tiongkok telah menandatangani sebuah kerjasama tentang perdagangan yang bernama Perjanjian ACFTA (*ASEAN-Tiongkok Free Trade Area*). Perjanjian tersebut didasari oleh keinginan kerja sama antar negara Tiongkok dan ASEAN yang melihat bahwa kedua belah pihak saling bergantung sama lain dalam praktik perdagangan internasional. Dalam ACFTA, terdapat sebuah kebijakan penurunan tarif pajak yang sebelumnya 90% menjadi 0% khusus barang impor. Kebijakan tersebut akan mempermudah ekspor-impur dan meminimalkan biaya dalam kegiatan ekspor-impur. Hal itu sejalan dengan perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok yang memiliki sistem dengan bertujuan untuk penghapusan biaya bea cukai yang masuk terhadap dampak globalisasi.

Di Indonesia sendiri, terdapat sebuah kebijakan yang bernama Hilarisasi Industri Minyak Sawit dengan tiga jalur yaitu, *Eleofood (Eleofood Complex)*, *Oleachemical Complex*, dan *Biofuel Complex*. Kebijakan tersebut membahas tentang pengembangan kawasan, tambahan penghasilan pajak, dan idustri hilir sawit (jasa pelabuhan/fasilitas). Kemudian, ada beberapa kebijakan yang juga mencakup 3 hilarisasi industri minyak sawit tersebut, yaitu kebijakan bea keluar/*duty*, pungutan ekspor/*levy*, dan mandatory terkait biodiesel solar impor. Kebijakan ini diyakini sebagai kebijakan jangka panjang dalam perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Pada tahapannya, Proses pertama melalui jalur hilirisasi oleopangan yang kemudian diolah oleh industri dengan pengolahan CPO *Fatty Aci*/PKO menjadi olein, stearin dan *Palm d Distillate*. Hasil produk dari proses tersebut seperti margarin, minyak goreng sawit, es krim, vitamin E, creamer, vitamin A, shortening, cocoa butter dan sebagainya. Kedua, melalui jalur hilarisasi oleokimia yang mengolah produk *refinery industry* dengan menghasilkan produk oleokimia seperti biosurfaktan (detergen, sabun, shampoo), biolubrikin (biopelumas), dan biomaterial (bioplastik). Jalur yang terakhir yaitu jalur hilarisasi biofuel yang menghasilkan produk pada *refinery industry* seperti biodiesel, biogas, biopremium, dan biovtur. Untuk memaksimalkan kebijakan hilarisasi tersebut, dikeluarkanlah beberapa kebijakan sebagai strategi dalam memaksimalkannya, yaitu kebijakan pengurangan pajak penghasilan

terhadap industri hilir kelapa sawit, adanya aturan insentif pajak yang mengacu pada Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011, ditetapkannya kebebasan bea masuk terhadap impor mesin dan bahan pembangunan, serta pengembangan industri hilir sawit. Berbagai strategi tersebut selain memaksimalkan kebijakan hiliarisasi Indonesia, akan tetapi juga memudahkan kegiatan perdagangan, khususnya ekspor-impor barang.

Jadi, mekanisme Indonesia dalam kerja sama ekspor-impor kelapa sawit (CPO) telah banyak melakukan kebijakan untuk menyesuaikan segala regulasi terhadap Tiongkok tentang regulasi ekspor-impor serta meratifikasi perjanjian ACFTA. Kemudian, Indonesia juga telah dijelaskan sebelumnya memiliki kebijakan hilirisasi sebagai kebijakan jangka Panjang terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut terus di dorong dan dimaksimalkan dengan menyesuaikan terhadap segala regulasi dan keadaan perekonomian global demi tercapainya kesuksesan terhadap diplomasi ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu, hal tersebut juga didasari kepada Ekspor kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan sebagai penyumbang devisa negara namun masih mengalami fluktuasi yang berubah-ubah dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian global.

Perkembangan Ekspor Impor Kelapa Sawit 2015-2019

Industri kelapa sawit menjadi sektor unggulan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan devisa negara. Tiongkok yang merupakan negara strategis ekspor kelapa sawit Indonesia memberikan peluang tersendiri untuk memaksimalkan produksi kelapa sawit dan CPO yang ada di Indonesia. Perkembangan ekspor-impor kelapa sawit tidak terlepas dari perjanjian ACFTA (*Asean Tiongkok Free Trade Area*) yang menjadi dasar dalam mekanisme ekspor-impor negara di kawasan Asia Tenggara dengan Tiongkok, terutama Indonesia.

Tabel 1. Devisa Negara dari Sektor Sawit

	2015	2016	2017	2018	2019
NILAI (USD)	18,67 M	18,1 M	22,97M	21 M	19 M

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami fluktuasi nilai pada pendapatan devisa negara dari sektor kelapa sawit. fluktuasi tersebut dapat kita lihat dari tahun 2015 ke 2016 yang mengalami penurunan sebanyak USD 500 juta dan mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar USD 4,8 Miliar. Fluktuasi nilai yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh perubahan permintaan Tiongkok terhadap kelapa sawit Indonesia, maupun penawaran dari Indonesia ke Tiongkok yang tidak terlepas dari jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia. Tidak hanya itu, tingkat konsumsi masyarakat Tiongkok akan kebutuhan kelapa sawit juga tergolong berubah-ubah, sehingga hal tersebut mempengaruhi permintaan akan kelapa sawit. Meskipun begitu, dari tahun

2016-2017, fluktuasi nilai yang terjadi mengalami perbaikan. Terbukti terjadi peningkatan devisa negara yang cukup jauh perbedaannya dari tahun 2016 ke 2017. Tren positif ini tentu harus terus dijaga agar di tahun-tahun berikutnya tidak mengalami penurunan. Namun sayangnya, pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan fluktuasi nilai kembali. Besar kemungkinan hal tersebut disebabkan adanya perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

a) Ekspor-Impor 2015-2016

Pada perkembangan yang terjadi, kelapa sawit merupakan sektor unggulan yang memberikan perkembangan nilai ekspor menurut negara tujuan menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada beberapa periode. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung cukup lama karena pada periode tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih terkendali. Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa dari tahun 2015, berat bersih ekspor kelapa sawit sebanyak 4.105,2 ton dan menghasilkan nilai FOB sebesar USD 2.451,7 juta. Hal tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu berat bersih menjadi 3.111,8 ton dan menghasilkan nilai FOB sebesar USD 2.190,2 juta.

Tabel 2. Perkembangan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	2015	2016
Berat bersih : 000 ton		
Tiongkok	4.105,2	3.111,8
Nilai FOB : 000 000 US \$		
Tiongkok	2.451,7	2.190,2

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Dari tabel di atas tidak hanya berdampak pada kelapa sawit, tetapi berdampak pada turunannya atau CPO (Crude Palm Oil). Beberapa analis dari PT Central Capital Futures (Wahyo Tri Wibowo) dan PT Asia Trades Point Futures (Deddy Yusuf Siregar) memberikan berbagai pendapat dan analisis, antara lain dikurangnya subsidi biodisel yang dilakukan pemerintah, sehingga menjadi salah satu faktor negatif pemicu menurunnya harga CPO di dalam negeri, tertekannya harga CPO yang disebabkan oleh pelaku pasar yang meninggalkan aset berisiko mereka menjelang referendum Brexit pada tanggal 23 Juni ini, dan permintaan CPO dari luar melemah atau mulai berkurang dari tahun sebelumnya akibat dari tekanan Global. (GAPKI, 2016)

Pernyataan atas kendala atau permasalahan atas penurunannya ekspor kelapa sawit pada kenyataannya disebabkan oleh tekanan terkait kondisi ekonomi dan politik global yang kemudian berdampak pada ekonomi nasional. Tekanan global tersebut membuat ketidakpastian perdagangan yang membuat dampak cukup signifikan pada periode tahun 2015-2016. Walau demikian, tren positif tetap akan ada jika pemerintah dan para aktor lainnya dapat bekerja sama dalam perkembangan ekspor kelapa sawit tersebut. mengapa demikian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini yang menunjukkan produksi industri kelapa sawit Indonesia masih terus berkembang walaupun mengalami penurunan pada tahun 2014-2016.

Tabel 3. Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2014-2016

	Produksi Tanaman Kelapa Sawit (Ribuan Ton)		
	2014	2015	2016
Indonesia	31.731,00	31.070,00	29.278,90

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (2018)

Seperti pada pernyataan sebelumnya, tren positif akan tetap ada jika pemerintah dapat memaksimalkan peluang yang ada dibawah tekanan global. Tercatat pada perkembangannya selama satu dekade mengalami perubahan yang signifikan pada perindustrian CPO (Crude Palm Oil) Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Pertanian bahwa area perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri atas 8 juta hektare, angka tersebut naik menjadi dua kali lipat pada tahun 2020 sebesar 13 juta hektare. hal tersebut dapat diartikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia akan tetap ada dan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Untuk lebih jelasnya, perkembangan industri kelapa sawit dalam periode 2015-2016 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit (CPO) Tahun 2015-2016

T A H U N	Minyak Sawit/Crude Palm Oil		Minyak Sawit lainnya/other of CPO		Jumlah/ Total	
	Volume (Ton)	Nilai 000 US\$	Volume (Ton)	Nilai 000 US\$	Volume (Ton)	Nilai 000 US\$
2015	7.788.550	4.388.094	18.679.014	10.997.181	26.467.564	15.385.275
2016	5.283.953	3.305.575	17.477.861	11.061.179	22.761.814	14.366.754

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Walaupun terjadinya fluktuasi pada periode ini, bahkan terjadi juga diperiode sebelumnya, tren positif akan tetap berlanjut. Hal ini selaras dengan pernyataan Riste Daewoo yang mengatakan bahwa ketidakpastian perkenomian global membuat lemahnya permintaan minyak kelapa sawit dunia, jika dilihat dari sisi netral, potensi industri CPO dalam negeri seharusnya tetap stabil dan terjaga dikarenakan Indonesia termasuk salah satu produsen CPO terbesar. Pada pernyataan tersebut memang benar terjadi bahwa pada faktanya industri kelapa sawit (CPO) Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan yang pesat tadi didukung oleh peningkatan jumlah produksi kelapa sawit (CPO) nasional dan juga permintaan ekspor kelapa sawit oleh negara tujuan, dalam hal ini yaitu Tiongkok.

b) Ekspor-Import 2017-2018

Perkembangan kelapa sawit yang terus menerus mengalami perubahan mengindikasikan adanya tingkat permintaan dari negara importir dalam mengkonsumsi kelapa sawit beserta turunannya seperti CPO dan minyak nabati serta jumlah produksi atau pemasokan kelapa sawit itu sendiri di dalam negeri. Pada periode 2017, produksi kelapa sawit Indonesia naik hingga 42,04 juta ton, sementara pada CPO produksinya mencapai 35,35 juta ton dengan rata-rata produktivitas sebesar 3.855 kg CPO per hektare. Dari total tersebut, 31,05 juta ton berhasil diserap oleh pangsa pasar. Produksi kelapa sawit yang besar tersebut tidak terlepas dari luas area perkebunan kelapa sawit yang mencapai 12,3 juta hektar (ha). Tiongkok menyerap sebanyak 3,73 juta ton sepanjang 2017. Penyerapan ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan kelapa sawit maupun turunan dari CPO seperti minyak nabati dan memberikan suatu peran yang sangat signifikan dalam konteks ketahanan pangan di dunia, khususnya di Tiongkok.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Pemerintah Tiongkok saat ini tengah menjalankan program mandatory biodiesel 5% yang membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit sebagai alternatif dari biodiesel untuk menyukseskan programnya itu. Hal ini menjadi tren positif bagi Indonesia karena pada tahun 2017 penjualan kelapa sawit maupun minyak sawit ke Amerika Serikat mengalami kelesuan lantaran diterapkannya kebijakan anti dumping dan subsidi kepada produk kelapa sawit dan biodiesel Indonesia. Penggunaan bea masuk yang tinggi juga diterapkan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Tiongkok menjadi sasaran tujuan ekspor kelapa sawit untuk mengatasi kelesuan akibat kebijakan yang telah Amerika Serikat tetapkan. Kebijakan tersebut memberikan implikasi terhadap nilai ekspor dan FOB Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2017-2018.

Tabel 5. Perkembangan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	2017	2018
Berat bersih : 000 ton		
Tiongkok	3601,1	4166,5
Nilai FOB : 000 000 US \$		
Tiongkok	2651,8	2637,6

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan tabel tersebut tampak jelas bahwa nilai total ekspor Indonesia dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Nilai ekspor yang semula pada tahun 2017 hanya sebesar 3601,1 ton menjadi 4166,5 ton di tahun 2018. Akan tetapi perbedaan terjadi pada nilai FOB dari periode tersebut. Nilai FOB pada tahun 2017 menyentuh angka 2551,8 juta USD namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 2637,6 juta USD. Kenaikan nilai ekspor yang terjadi nyatanya tidak menjamin bawa nilai FOB juga akan mengalami kenaikan. Meskipun begitu, harus kita akui bahwa salah satu penyebab dari terjadinya fluktuasi baik dari nilai ekspor maupun nilai FOB adalah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kala itu mulai memanas.

Fluktuasi ini terjadi dari berbagai hal, salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan ini disebabkan karena dollar menjadi mata uang yang digunakan dalam bertransaksi. Tidak hanya itu, biaya logistik yang cenderung mahal yang harus diekspor ke Tiongkok dengan menggunakan kapal juga menjadi salah satu penyebab fluktuasi terjadi.

Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang bersepakat bersama Joko Widodo untuk melakukan penambahan kuota ekspor kelapa sawit sebanyak 500 ton, hal ini sebagai pertimbangan terhadap petani kelapa sawit berskala kecil. Tren positif lainnya dapat kita lihat bahwa pada Oktober 2018, Tiongkok mengimpor minyak sawit sebanyak 541,810 ton dari Indonesia. Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 63% dari capaian September di tahun yang sama yang hanya berkisar 332.520 ton. Peningkatan yang drastis tersebut disebabkan negeri Tirai Bambu itu mulai membatasi pembelian kedelai dari negeri Paman Sam pada Maret 2018 (CNN Indonesia, 2018).

c) Ekspor-Import 2019

Per tahun 2019, keadaan ekonomi dunia sedang mengalami berbagai guncangan, salah satu penyebabnya adalah adanya perang dagang. Terkait perang dagang yang terjadi, hal tersebut ternyata memberikan dampak kepada perindustrian kelapa sawit Indonesia di tahun 2019. Pada tahun ini, kelapa sawit Indonesia memproduksi minyak sawit/CPO sebesar 51,8 juta ton atau 9% lebih tinggi dari produksi tahun lalu, yaitu 2018. Akan tetapi, nilai ekspor minyak sawit nasional sepanjang 2019 hanya mencapai USD 19 Miliar atau turun sekitar 17,39% dari tahun 2018 yang kala itu mencapai USD 21 Miliar. Tiongkok sebagai salah satu negara importer kelapa sawit dari Indonesia menyerap sebanyak 6 juta ton kelapa sawit beserta minyak sawit/CPO dari jumlah volume total yang sebesar 36,7 juta ton sepanjang tahun 2019 ini.

Pada semester pertama 2019, ekspor CPO beserta turunannya, kecuali biodiesel dan oleochemical ke Tiongkok naik 39%, yang sebelumnya 1,82 juta ton menjadi 2,54 pada semester pertama di tahun 2018. Kenaikan ini membuat adanya pergeseran nilai harga yang terjadi. Sepanjang semester pertama ini, harga minyak sawit/CPO bergerak di kisaran USD 492,5 – USD 567,5 per metrik ton dengan kisaran harga USD 501,5 – USD 556,5 per metrik ton. Anggapan datang dari Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia mengatakan bahwa perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat berisiko dalam mempengaruhi harga dan pasar kelapa sawit pada tahun ini. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perang dagang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga dan volume ekspor kelapa sawit sepanjang tahun 2019. Kita dapat meninjau kembali volume total dan nilai ekspor kelapa sawit sepanjang 2019 (Bayu Krishnamurti, 2019).

Tabel 6. Volume Total dan Nilai Ekspor Kelapa Sawit 2019

Volume Total (juta ton)	Nilai Ekspor (USD Miliar)
35,17 Juta	19 M

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (2020)

Terjadinya kenaikan volume total produksi kelapa sawit nyatanya tidak menjamin akan terjadinya peningkatan dari segi nilai ekspor. Diketahui bahwa volume total tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi nilai ekspor yang diterima Indonesia dari ekspor tersebut mengalami penurunan. Tidak hanya datang dari perang dagang saja, isu virus korona yang terjadi di Tiongkok di akhir tahun 2019 juga menjadi salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga dari kelapa sawit itu sendiri. Fluktuasi tersebut juga disebabkan oleh permintaan Tiongkok yang semakin melambat lantaran lebih memprioritaskan kepada sektor kesehatan yang tengah dibutuhkan kala itu. Tiongkok melakukan pembatasan keluar masuk barang dari/dan ke Tiongkok untuk menekan angka penyebaran korona yang tengah terjadi.

Menyikapi perkembangan di tahun 2019, mengeluarkan strategi kebijakan dalam mencari alternatif tujuan ekspor kelapa sawit sebagai bentuk antisipasi dalam merespon turunnya permintaan Tiongkok yang disebabkan oleh perang dagang dan virus korona. Strategi tersebut dilakukan dengan cara antara lain melakukan lobi perdagangan dengan mitra baru, Melakukan soal kesepakatan tarif bea masuk, meningkatkan jaminan atas kualitas dan ketersediaan produk secara berlanjut, serta meningkatkan kerja sama perdagangan untuk meningkatkan akses pasar (Direktur Jenderal Perkebunan Kasdi Subagyono, 2019). Adanya strategi kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kelesuan dan penurunan permintaan kelapa sawit maupun CPO oleh Tiongkok dari Indonesia.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori dual ekonomi memiliki keterkaitan dengan mekanisme ekspor-impor kelapa sawit Indonesia-Tiongkok. Hal itu dikarenakan bahwa kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan negara serta memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, khususnya kelapa sawit. Ekspor-impor tersebut juga berkaitan dengan kompetisi pasar yang tengah terjadi saat ini. Di lain sisi, mekanisme ekspor-impor kelapa sawit yang dijalankan oleh Indonesia dan Tiongkok tidak terlepas dari adanya perjanjian kerja sama negara ASEAN dengan Tiongkok pada tahun 2004 atau yang biasa disebut ACFTA (ASEAN Tiongkok Free Trade Area) yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pada mekanisme kebijakan ekspor Indonesia terdapat kebijakan hilirisasi industri minyak sawit dengan tiga jalur yaitu, Eleofood (Eleofood Complex), Oleochemical Complex, dan Biofuel Complex. Kebijakan ini terlihat pada pengurangan pajak penghasilan terhadap industri hilir kelapa sawit, adanya aturan insentif pajak yang mengacu pada Menteri

Kuangan Nomor 130/PMK.011, ditetapkannya kebebasan bea masuk terhadap impor mesin dan bahan pembangunan, serta pengembangan industri hilir sawit. Namun, jika ditinjau dari tahun 2015-2019, pendapatan negara mengalami fluktuasi harga sebagai akibat adanya tekanan global, penurunan permintaan Tiongkok, dan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat-Tiongkok. Dapat dilihat bersama bahwa fluktuasi tersebut terjadi pada

Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan (CPO) lebih baik lagi dengan pengimplementasian kebijakan ekspor-impor kelapa sawit yang lebih tertuju pada peningkatan perekonomian negara. Tidak hanya itu, penulis juga berharap bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia yang dikenal sebagai komoditas terbesar di dunia harus lebih dimasifkan kembali negara tujuan ekspornya agar terciptanya tujuan diplomasi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Asmadiyah Purwaning dan Fitri Juniwati. 2018. "Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19, no. 1 (2018): 10-1.
- Azahari, Delima Hasri. 2018. "Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala dan Prospek." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 36, no. 2 (2018): 95-81.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perdagangan Luar Negeri. Diakses pada 2 Oktober 2020. <https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html>.
- Budi, Purnomo dan Aliman. 2001. "Kausalitas Antara Ekspor dan Bisnis Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16, no. 2 (2001): 137-122.
- CNN INDONESIA. 2020. Bertemu Jokowi, PM Tiongkok Setuju Tambah Impor CPO 500 Ribu Ton. Diakses 2 Oktober 2020. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180507/30848-92-296240/bertemu-jokowi-pm-tiongkok-setuju-tambah-impor-cpo-500-ribu-ton>.
- Demitra Hendaryati, Dewi, dan Yanuar Arianto. 2018. *Statistik Perkebunan Indonesia Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit Palm Oil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan RI.
- Ermawati, Tuti dan Yeni Saptia. 2013. "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7, no. 2 (2013): 148-129.
- Ewaldo, Ega. 2015. "Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia." *E-Jurnal Perdagangan Industri dan Monster* 3, no. 1 (2015): 15-10.
- Eximbank, Indonesia. 2018. *Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia: Minyak Sawit*. Jakarta: Eximbank Indonesia.
- GAPKI. 2016. *Industri Minyak Sawit Merupakan Industri Strategis Nasional*. Diakses pada 5 Oktober 2020. <https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional>.
- Gumilar, Pandu. 2019. *Efek Perang Dagang AS-Tiongkok Bisa gerus Kinerja CPO Indonesia*. Diakses pada 5 Oktober 2020. <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190606/99/931173/efek-perang-dagang-as-tiongkok-bisa-gerus-kinerja-cpo-indonesia>.

- Hafizah, Dian. 2011. "Kajian Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar." *AGRISEP* 10, no. 2 (2011): 170-154.
- HSH. 2015. *Prosedur dan Tata Cara Ekspor Barang ke Luar Negeri*. Diakses Oktober 5, 2020. <https://hsh.co.id/prosedur-dan-tata-cara-ekspor/>.
- Killian, Erza. 2012. "Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia." *Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang* 6, no. 2 (2012) : 185-170.
- Laksono, Herry, dkk. 2019. *Peran Diplomasi dalam Mendukung Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral.
- Listyorini, Enny. 2019. *Proyeksi Ekspor Berdasarkan Industri: Komoditas Unggulan*. Jakarta: Indonesia Eximbank.
- Patriani, Ira. 2017. *Buku Ajar: Ekonomi Politik Internasional*. Pontianak: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNTAN.
- Prasetyo, Whisnu Bagus. 2014. 2015, *Industri CPO Masih Dibayangi Tekanan Global*. Diakses 3 Oktober 2020. <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/archive/235661/2015-industri-cpo-masih-dibayangi-tekanan-global>.
- Setyaningrum, Putri Mei. 2020. *Pasar Sawit Tiongkok Tidur, Strategi Ekspor ke Negara Lain Sudah Disiapkan*. Diakses pada 5 Oktober 2020. <https://m.wartaekonomi.co.id/berita279303/pasar-sawit-Tiongkok-tidur-strategi-ekspor-ke-negara-lain-sudah-disiapkan>
- Sundari, Prayuda dan. 2019. "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis." *Journal of Diplomacy and International Studies* 1, no. 2 (2019): 80-93.
- Supriyanto, Bambang. 2016. *Perdagangan, Pariwisata, dan investasi Bisa Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses pada 6 Oktober 2020. <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20161013/12/592322/perdagangan-pariwisata-dan-investasi-bisa-dukung-target-pertumbuhan-ekonomi>.
- Supriyono, Joko. 2017. *Sejarah Kelapa Sawit Indonesia*. Diakses pada Oktober 4, 2020. <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>.
- Ulfiah, Kiki, dkk. 2018. "Nilai Ekonomi Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guinensia* Jack): Untuk Rakyat Indonesia." *Munich Personal Repec Archive Paper no. 90215* (2018): 33-3.